

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Elisa Putri Kholifah¹, Farid Setiawan², Nurul Lahdilah Fitri³

Universitas Ahmad Dahlan

Email: elisa1900031292@webmail.uad.ac.id¹, farid.setiawan@pai.uad.ac.id²,
nurul1900031066@webmail.uad.ac.id³

ABSTRAK

Implementasi Pendidikan memiliki arah tujuan agar terealisasinya kebijakan Pendidikan yang telah di ciptakan. Kajian mengenai kebijakan Pendidikan ini memiliki tujuan agar terdeskripsi secara tertulis mengenai proses implementasi kebijakan termasuk dalam hal Pendidikan. Pada pelaksanaannya Implementasi kebijakan Pendidikan adalah rangkaian kegiatan yang saling berkaitan dengan ke administrasian sebagai pertanggung jawaban dari pelaksanaan sebuah program yang di dalamnya mengandalkan kebijakan. Proses dari implementasi Pendidikan saling terkait antara satu factor dengan factor lain, seperti factor politik, sosial, hukum dan ekonomi yang baik secara langsung atau tidak akan mempengaruhi tingkah laku berbagai pihak pelaksana program. Dalam pelaksanaannya implementasi perlu memperhatikan prosesnya, perlu dipertimbangkan strategi serta pendekatan yang digunakan, tahapan perumusan, kecukupan serta kelengkapan dari administrasi. Hal ini demi terwujudnya keberhasilan dalam mengimplementasikan kebijakan Pendidikan. Penelitian ini menggunakan penelitian studi Pustaka atau *library research*. Data penelitian berupa artikel-artikel ilmiah yang tentu berhubungan dengan peimplementasian kebijakan Pendidikan, didukung data yang terkumpul dan di analisis isi dari artikel tersebut.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Kebijakan Pendidikan, Realisasi Kebijakan

ABSTRACT

The implementation of education has a goal in order to realize the education policies that have been created. This study on education policy aims to provide a written description of the policy implementation process, including in terms of education. In practice, the implementation of education policies is a series of interrelated activities related to administration as the responsibility for implementing a program that relies on policies. The process of implementing education is interrelated between one factor and another, such as political, social, legal and economic factors that either directly or indirectly affect the behavior of various program implementers. In its implementation, it is necessary to pay attention to the process, to consider the strategies and approaches used, the stages of formulation, the adequacy and completeness of the administration. This is for the realization of success in implementing education policies. This research uses library research or library research. The research data is in the form of scientific

articles which are certainly related to the implementation of education policies, supported by the data collected and analyzed the contents of the article.

Keywords: Policy Implementation, Education Policy, Policy Realization

PENDAHULUAN

Memulai perbincangan mengenai “Implementasi Kebijakan Pendidikan” dalam artikel ini, sedikit mengutip dari pendapat Syaefudin Sa’ud dan Abin Syamsuddin Makmun mengenai kekuasaan kebijakan di Indonesia, yaitu:

“Kekuasaan kebijakan mencakup setiap hukum yang memperhatikan kesejahteraan semua orang dalam negaranya atau setiap individu didalamnya, apakah berkaitan dengan hak-hak atau kewajiban, apakah penghargaan sebagai individu atau warganegara, hak-hak individu atau kekayaan seluruh orang dalam negaranya atau setiap individu di dalamnya. Kekuasaan kebijakan adalah kekuasaan negara untuk membatasi hak-hak individu atas kepentingan kelompok sosial karena mempertimbangkan kesehatan masyarakat, keamanan, kesejahteraan atau moral.”¹

Dari pernyataan diatas dapat dipahami bahwa negara memiliki peran negara sangat vital karena negara memiliki kewenangan dalam menciptakan kebijakan, hal ini berbentuk peraturan perundangan-undangan. Negara memiliki kebebasan dalam merumuskan serta menjalankan kebijakan termasuk di dalamnya kebijakan mengenai Pendidikan. Kebijakan dalam bidang Pendidikan merupakan langit harapan masyarakat agar tercapainya Pendidikan yang memadai bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan tidak mungkin kebijakan Pendidikan ini menjadi bagian dari kebijakan public yang ada, artinya peran rakyat dalam tercapainya cita-cita social secara Bersama akan menentukan seperti apa bentuk kebijakan Pendidikan di negara ini.

Berdasarkan Keputusan Menpan No.63/Kep./M.PAN/7/2003 Presiden Republik Indonesia, “Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No 63/KEP/M.PAN/7/2003,” Ombudsman, 2019., tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan pelayanan Publik, dalam Keputusan tersebut dijelaskan bahwa layanan public yang dilakukan oleh pemerintah dibagi lagi menjadi 3 kelompok administrative, yakni: Pertama, kelompok pelayanan memiliki hasil berbentuk dokumen resmi yang pasti dibutuhkan public. Kedua, kelompok pelayanan yang memiliki hasil dari banyak jenis barang yang mampu digunakan oleh public. Ketiga, kelompok layanan yang memiliki hasil berupa jasa yang dibutuhkan oleh public. Layanan public dapat dipahami sebagai segala hal yang dilakukan oleh Lembaga Pendidikan dalam rangka mencerdaskan anak bangsa sebagai pelaku ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹(Sa’ud Udin Syaefudin, 2009) Hal. 186

Kemudian ada 3 pelakunya: (1) pencipta kebijakan, (2) pelaksana pelayanan public dan (3) penerima layanan. Secara ideal implementasi kebijakan merajut hubungan antara politik dengan Pendidikan karena pada realitanya Lembaga Pendidikan yakni sekolah yang seharusnya menjadi role model dari implementasi Pendidikan pada satuan Pendidikan yang melahirkan ide-ide serta mengembangkan produk kebijakan pemerintah pada bidang Pendidikan akan tetapi kerap terabaikan karena kepentingan para pemangku di Lembaga Pendidikan tersebut sehingga, dapat terabaikannya sumber-sumber inovasi dalam pengembangan Pendidikan. Karena secara kasat mata dapat dilihat bahwa politik dan Pendidikan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan karena kekuasaan birokrasi yang menggelutinya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berfokus pada studi Pustaka yang menggunakan artikel-artikel ilmiah serta buku sebagai objek penelitian. Penelitian kepustakaan, menggunakan metode pengumpulan data penelitian terutama dari buku dan artikel yang berkaitan dengan “implementasi kebijakan Pendidikan.” Selanjutnya data yang terkumpul disortir, disajikan serta dianalisis agar hasilnya dapat diolah secara ringkas, efisien dan sistematis. Teknik yang digunakan merupakan Teknik analisis isi yakni analisis mengenai isi pesan sebuah data. Dalam menganalisis tentu akan menyaring hal-hal yang perlu untuk dicantumkan dalam artikel ini kemudian hal-hal penting ini akan menjadi poin pembahasan yang nantinya akan ditelaah dan dikembangkan berdasarkan informasi yang mendukung penelitian ini sehingga diperoleh hasil yang dapat menjadi acuan dalam penelitian-penelitian yang akan datang.

PEMBAHASAN

1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna pelaksanaan atau penerapan. Istilah ini erat kaitannya dengan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan. Dalam kamus Webster yang dikutip oleh Solichin mengemukakan bahwa implementasi memiliki makna secara ringkas yakni *to implement* atau mengimplementasikan yang berarti *to provide means for carrying out and to give practical effect to* (menyediakan sarana untuk melakukan Tindakan dan menimbulkan akibat terhadap sesuatu). Berdasarkan definisi di atas maka implementasi dapat dimaknai sebagai sebuah proses dalam pengambilan keputusan dalam hal ini dapat berupa peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, perintah presiden atau dekrit presiden dan keputusan peradilan. (Rusdiana, 2015) pada pelaksanaannya implementasi bukan merupakan hal yang berkaitan dengan mekanisme penjabaran keputusan politik yang masuk pada prosedur rutin yang diberitakan melalui saluran birokrasi akan tetapi implementasi lebih dari hal itu. Implementasi mencakup hal yang

lebih luas seperti, masalah konflik, keputusan, serta siapa yang memperoleh sesuatu dari pelaksanaannya. Maka dari itu tidaklah salah apabila dikatakan bahwa implementasi merupakan aspek yang sangat penting dari serangkaian proses pelaksanaan.

Istilah kebijakan, banyak orang menganggap bahwa kebijakan disama artikan dengan *policy*. Padahal secara terjemah belum diketahui apakah *policy* merupakan makna dari kebijakan? Donovan dan Jackson dalam Keban(Keban T, 2004)mengutarakan bahwa konteks *policy* secara filosofis merupakan sebuah produk atau kerangka kerja. Kemudians ebagai sebuah konsep filosofis kebijakan adalah rangkaian prinsip atau keadaan yang diharapkan apabila dipandang sebagai sebuah produk, kebijakanaan dipandang sebagai rangkaian kesimpulan atau rekomendasi. Akan tetapi apabila dipandangan sebagai proses maka kebijakan akan dinilai dari cara kerja program dan mekanisme dalam mencapai tujuan yang di harapkan sehingga kebijakan dapat menjadi kerangka kerja, proses dan negosiasi dalam perumusan isu serta metode implementasi. (Alfirzan et al., 2021)

Wahab mengutaarakan bahwasanya *policy implementation encompasses those actions by public or private individuals groups that are directed the achievement of objecteves set forth in prior decision* (Perbuatan masing-masing dari individu, pemerintah beserta kelompok swasta yang tentu akan mengarah pada teraplikasinya tujuan yang telah diputuskan dalam keputusan mengenai suatu kebijakan)(Wahab, 2005). Mengenai pengimplementasian kebijakan, Udoji berpendapat dengan tegas bahwasanya, *the execution of policies is a important if not more important than policy making. Policy will remain dreams or blue prints file jackets unless they are implemented* (suatukebijakanituseharusnyadilaksanakankarenahalitumerupakan suatuhall yang penting, mungkin saja jauh lebih penting dari pencipta kebijakan itu sendiri. Akan tetapi kebijakan itu hanya akan menjadi impian apabila hanya disimpan dengan rapi dalam sebuah arsip tetapi tidak untuk dieksekusi) maka dari itu, implementasi dari kebijakan pendidikan perlu dilakukan secara bijaksana, melihat situasi, berlandaskan kompetensi atau keahlian serta diawasi pemberdayaannya.

Dalam penerapannya implementasi kebijakan public tidak hanya berurusan dengan badan administrasi yang memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan programnya serta taat akan kelompok yang menjadi sasarannya, akan tetapi bersangkutan dengan permasalahan politik, sosial dan ekonomi yang baik secara langsung maupun tidak dapat member pengaruh semua pihak yang melaksanakannya dan pada akhirnya akan berpengaruh pada dampak positif yang diharapkan. Hal ini selaras dengan pendapat Winarno(Winarno, 2007) yang mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah usaha dalam mencapai tujuan tertentu disesuaikan dengan sarana prasarana tertentu dan dilaksanakan dalam waktu yang telah ditentukan. Karena, implementasi kebijakan merupakan sebuah proses yang selalu mengikuti

perkembangan, dalam hal ini pelaksana kebijakan harus melakukan aktifitas atau kegiatan yang pada akhirnya akan membuahkan hasil yang sesuai dengan harapan.

2. Tujuan Implementasi Kebijakan Pendidikan

Kebijakan yang mengatur mengenai Pendidikan sebenarnya sudah sangat banyak, hal ini seharusnya mempermudah perumusan serta ruang gerak bagi para praktisi Pendidikan di Indonesia untuk lebih berinovasi dan memperbaiki sistem Pendidikan agar sesuai dengan harapan Pendidikan nasional. Banyaknya permintaan pada bab pembaharuan Pendidikan di Indonesia yang dalam hal ini member pengaruh pada kebijakan Pendidikan yang telah mengalami banyak perubahan dan tentu erat kaitannya dengan tujuan dari implementasi kebijakan yang mengalami banyak perubahan pula. (Hastuti & Soehartono, 2018)

Implementasi kebijakan memiliki tujuan untuk menentukan serta menetapkan arah dari realisasi tujuan kebijakan, dalam prosesnya implementasi kebijakan dapat dimulai apabila tujuan dari kebijakan telah ditentukan atau ditetapkan, program-program yang direncanakan sudah disahkan serta dana yang dialokasikan telah turun untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Dalam penerapan tujuan implementasi kebijakan sebagai suatu proses interaksi antara tujuan dan Tindakan yang mampu meraih hal yang diinginkan. Penerapan dari kemampuan ini berguna untuk menciptakan hubungan lebih lanjut dalam serangkaian sebab akibat antara Tindakan yang dilakukan dengan tujuan yang diharapkan.

Tujuan dari implementasi kebijakan perlu diaplikasikan sesuai dengan rencana pada prakteknya karena implementasi kebijakan tidak boleh hanya focus atau terbatas pada tingkah laku dari unit birokrasi yang bertanggung jawabkan tetapi dalam pelaksanaan program-programnya harus sesuai dengan target tujuan yang telah dibuat, akan tetapi yang lebih penting dari itu semua ialah kuatnya jaringan politik social ekonomi yang tentu memiliki pengaruh dalam perilaku semua pihak yang terlibat pada pelaksanaan implementasi kebijakan Pendidikan. (Rasyidin, 2018) Pada tahap perumusan tujuan serta pembentukan kebijakannya perlu memperhatikan beberapa hal yang mungkin menjadi konsekuensi karena apabila suatu kebijakan yang dibuat dengan tidak tepat tentu akan berakhir dengan kegagalan dan ketidak berlakuan kebijakan tersebut. Bahkan mungkin, kebijakan yang telah dipersiapkan sedemikian rupa masih memiliki kemungkinan untuk gagal, semua itu kembali pada bagaimana pencipta kebijakan menentukan strategi dan cara yang efisien untuk pengaplikasian kebijakan. Selain dari itu, kebijakan yang berhasil tentu yang bisa di aplikasikan dengan sempurna atau dapat diterima oleh khalayak umum, kemudian yang dapat di ukur tingkat efektivitasnya dan kemudian dapat dilihat perubahan setelah diberlakukan kebijakan tersebut.

3. Prinsip Implementasi Kebijakan Pendidikan

Pada pengimplementasian sebuah kebijakan dibutuhkan lebih banyak keterlibatan tenaga kerja maupun kompetensi dari organisasi terkait, pengaplikasian kebijakan pada hakikatnya bersifat interaktif. Dalam hal tercapainya efektivitas implementasi kebijakan didasari pada tiga prinsip yang perludipenuhi yakni: *pertama*, ketepatan kebijakan. Ketepatan yang dimaksud dalam hal ini untuk menilai sejauh mana kebijaksanaan yang sudah ada mampu memuat hal-hal guna menjadi solusi pemecahan masalah yang akan diselesaikan. *Kedua*, kesesuaian kebijakan yang telah dirumuskan dengan bentuk masalah yang akan diselesaikan sehingga akan membentuk arah yang selaras antara solusi yang ditawarkan dengan masalah yang ada, keselarasan ini akan mempermudah indentifikasi masalah dan pengelompokan masalah menurut solusi yang akan diberikan. *Ketiga*, kesesuaian kewenangan Lembaga yang menciptakan kebijakan dengan karakter kebijakan yang dibuat. Yang dimaksud dalam hal ini kesesuaian wewenang dengan problem yang ditangani karena apabila Lembaganya tidak sesuai maka masalah yang di selesaikan akan kurang tepat dengan fokus Lembaga dan pemecahan tidak akan maksimal sesuai harapan yang diinginkan. (Yuliah, 2020)

4. Proses Implementasi Kebijakan Pendidikan

Untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan tentu akan menjadi masalah apabila tujuan utama belum terbentuk, dan akan menjadi sulit untuk membuat kebijakan yang adil dan baik. Masalah yang lain adalah sulitnya memenuhi berbagai tuntutan dari masing-masing kelompok yang akan memunculkan konflik pendorong berkembangnya pemikiran-pemikiran politik, dalam prosesnya implementasi dari kebijakan memiliki beberapa poin yang berhubungan dengan berjalannya proses serta layak untuk diperhatikan, meliputi materi dan model dari implementasi kebijakan, Langkah dalam melakukan implementasi, factor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan, dan tantang serta kendala yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. (Sa'ud Udin Syaefudin, 2009)

Secara singkat Winarno mengemukakan(Winarno, 2007) terdapat empat proses dalam pengimplementasi kebijakan Pendidikan yakni:

a. Komunikasi

Edwards dalam Winarno menyebutkan tiga hal yang penting dalam proses komunikasi kebijakan yaitu 1) **transmisi**, transmisi merupakan kesadaran pejabat yang seharusnya menyadari bahwa Ketika suatu keputusan telah diciptakan dan suatu perintah telah dikeluarkan maka harus mempersiapkan pemecahan masalah apabila terjadi hambatan-hambatan yang mungkin akan terjadi. 2)**kejelasan**, apabila kebijakan telah diimplementasikan maka bukan petunjuk pelaksanaannya saja yang diterima akan tetapi juga komunikasi dari kebijakan yang telah dikeluarkan sudah jelas. 3)**konsistensi**, apabila ingin

implementasi kebijakan berlangsung secara efektif maka perintah dalam pelaksanaannya harus jelas dan konsisten karena apabila perintah yang diberikan inkonsisten maka akan mempersulit pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugas dengan baik.

b. Sumberdaya

Factor terpenting dalam pelaksanaan kebijakan public, dalam sumber daya ini akan meliputi staf yang mendukung disertai dengan kompetensi yang sesuai dengan tugasnya. Serta didukung informasi, wewenang dan fasilitas yang diperlukan.

c. Kecenderungan dalam bersikap

Kecenderungan ini berkaitan dengan kemampuan mengeksekusi kebijakan, karena kecakapan tidak mampu memenuhi tanpa didukung kesediaan dan komitmen yang mumpuni dalam melaksanakan suatu kebijakan.

d. Struktur birokrasi

Berkaitan dengan ketepatan organisasi yang melaksanakan implementasi kebijakan. Karena struktur organisasi yang melaksanakan implementasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi yang dijalankan. Salah satu aspek yang harus ada dalam organisasi adalah adanya proses operasional yang jelas dan sesuai dengan standar sehingga dapat menjadi pedoman.

5. Tahap Perumusan Implementasi Kebijakan

Perumusan kebijakan yang sebenarnya melibatkan identifikasi dan analisis serangkaian tindakan pemecahan masalah. Setiap solusi yang mungkin dinilai berdasarkan jumlah faktor, seperti kemungkinan efektifitasnya, kemungkinan biaya yang terlibat dalam penerapannya, konteks politik yang relevan dengan kebijakan dan kemungkinan ditawarkan oleh masyarakat.(Luis & Moncayo, n.d.) Lebih jauh, Torjman berkomentar, ia menyebutkan bahwa langkah-langkah pengambilan keputusan dalam proses pembuatan kebijakan adalah sebagai berikut :

- a. Ada tujuan yang ingin di capai dan pilihan tujuan biasanya dilakukan dengan mengutamakan hal-hal yang mendesak.
- b. Mengidentifikasi tujuan yang ditetapkan.
- c. Menentukan arah untuk tujuan yang telah ditentukan.
- d. Merancang prosedur dan alat ukur secara khusus berkaitan dengan tujuan yang telah ditetapkan.
- e. Menerapkan rencana dan menggunakan alat pengukuran yang di rancang untuk menilai dampak atau keberhasilannya.

6. Strategi Dan Langkah Implementasi Kebijakan Pendidikan

Kebijakan yang telah disusun harus disertai dengan tahap implementasi. Agar dapat di implementasikan secara optimal terdapat beberapa strategi dan

langkah yang harus dilakukan oleh pembuat kebijakan yaitu : pertama, mengidentifikasi isu-isu yang harus dilaksanakan. Kedua, menentukan tujuan yang ingin dicapai. Ketiga, merancang struktur proses implementasi. Dalam menyusun struktur implementasi, beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain: penataan organisasi atau personel pelaksana, penjabaran tujuan dalam berbagai peraturan pelaksana, pengkoordinasian berbagai sumber daya dan pengeluaran untuk kelompok sasaran, dan pembagian tugas antar departemen, badan eksekutif, dan mengalokasikan sumber daya untuk mencapai tujuan. Agar kebijakan dapat berfungsi sebagaimana dimaksud, maka langkah-langkah yang harus dilakukan adalah mempersiapkan kebijakan untuk implementasinya, seperti sosialisasi dan pemberdayaan semua pihak di pemerintah atau birokrasi pelaksana kebijakan pendidikan sebagai masyarakat. Sosialisasi dilakukan dengan menyebarkan kepada masyarakat mengenai informasi melalui berbagai media dan akan bertemu langsung dengan masyarakat. Langkah selanjutnya adalah menerapkan kebijakan bebas sanksi untuk jangka waktu tertentu, dan jika perlu memperbaiki kebijakan tersebut. Penegakan kebijakan di kombinasikan dengan sanksi. Hal ini dilakukan pada akhir masa percobaan dan disertai dengan pengawasan dan pengendalian. Setelah kebijakan diimplementasikan, dilakukan evaluasi kebijakan. (Alfirzan et al., 2021)

7. Kecukupan dan Kelengkapan Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan dikatakan berhasil apabila implementasi atau implementasinya sesuai dengan desain, tujuan, dan sasaran dari kebijakan itu sendiri, serta memberikan dampak dan hasil yang positif dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. (Darsyah & Chanifudin, 2020) Untuk memenuhi kelengkapan dan kecukupan kebijakan pendidikan, beberapa perangkat harus diperhatikan, yaitu :

a. Hukum

Hukum adalah alat pemerintah yang paling umum digunakan. Dengan membuat undang-undang, pemerintah memiliki legitimasi untuk menegakkan suatu kebijakan dan dapat menegakkan kepatuhan terhadapnya oleh setiap warga negara

b. Pelayanan

Pelayanan kebijakan dapat berupa pemerintah yang melayani masyarakat. Akan tetapi, harus diingatkan bahwa pelayanan terbaik adalah pelayanan yang menjangkau mereka yang membutuhkan atau sesuai dengan tujuannya.

c. Dana Pajak

Pendanaan diperlukan sebagai sumber dana untuk menadai seluruh kegiatan pelayanan dan implementasi kebijakan. Pajak adalah alat yang dikelola pemerintah yang dikembalikan kepada dan bermanfaat bagi masyarakat melalui berbagai bentuk perencanaan yang lebih baik.

d. Situasi

Jika alat di atas tidak berfungsi, situasi adalah alat yang di gunakan oleh pemerintah. Alat ini dapat memanfaatkan keyakinan moral untuk mempengaruhi masyarakat..

Perangkat lain untuk mengimplementasikan suatu kebijakan adalah pembentukan organisasi pemerintah dan non-pemerintah. Organisasi yang ideal untuk menjamin keberhasilan implemnetasi kebijakan adalah : pertama, adanya kesatuan dalam organisasi. Kedua, memperjelas standar pelaksanaan program. Ketiga, mekanisme komunikasi organisasi yang baik. Keempat, tidak ada kendala waktu pelaksanaan dan tidak ada masalah informasi dalam pelaksanaannya.

8. Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Hal-hal yang menjadi faktor mempengaruhi implementasi kebijakan pendidikan akan tergantung pada banyak variabel atau faktor yang masing-masing saling berhubungan.(Amal, 2018)Menurut Edwards III dari Tilaar, implementasi kebijakan di pengaruhi oleh empat variabel yaitu :

a. Komunikasi

Impelementasi dapat dilakukan secara efektif jika individu yang bertanggung jawab untuk mencapai tujuan kebijakan memahami ruang lingkup dan tujuan kebijakan. Dengan demikian, kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan perlu dikomunikasikan secara tepat kepada para pelaksanan.

Tiga indikator untuk menilai keberhasilan aspek kemunikasi ini, yaitu :

- 1) Transmisi, merupakan saluran komunikasi yang baik dan juga akan menghasilkan hasil implementasi yang baik. Seringkali terjadi kesalahpahaman dalam penyampaian ini, yang disebabkan oleh pelaksanaan komunikasi.
- 2) Informasi yang jelas, pelaksana kebijakan harus melakukan komunikasi dan mendapatkan informasi yang jelas dan tidak membingungkan. Kejelasan informasi kebijakan tidak selalu menghambat implementasi kebijakan, pada satu tingkat pelaksanaan membutuhkan keluwesan untuk mengimplementasikan kebijakan, namun pada tingkat akan mendistorsi apa yang telah dibuat untuk dicapai.
- 3) Konsistensi informasi yang disampaikan berarti bahwa pemerintah atau informasi yang diberikan dalam eksekusi harus jelas dan konsisten agar dapat dieksekusi dan dieksekusi. Jika sering terjadinya perubahan perintah yang diberikan, dapat menyebabkan pelaksana kebingungan di lapangan.

4) Sumber daya, jika kekurangan sumber daya manusia, pengawasan tidak akan dilakukan dengan baik dan program tidak akan terlaksana sepenuhnya.

b. Sumber daya

Aspek manajemen sumber daya ini meliputi jumlah tenaga kerja, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk melaksanakan kebijakan dan pemenuhan sumber daya yang relevan dalam pelaksanaan program, kewenangan untuk mengarahkan program apa adanya. Harapan dan ketersediaan fasilitas pendukung yang dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan program seperti pendanaan dan infrastruktur. Jika terjadi kekurangan sumber daya manusia, pengawasan tidak akan dilakukan dengan baik dan program tidak akan terlaksana sepenuhnya. Jika staf pelaksana kebijakan terbatas, keahlian pelaksanaan dalam menjalankan program perlu ditingkatkan.

c. Disposisi

Disposisi adalah ciri khas dari pelaksana, seperti kejujuran, komitmen dan kepribadian demokratis. Salah satu aspek yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan ialah para pelaksana. Jika pelaksana setuju dengan kebijakan tersebut, ia akan dengan senang hati mengimplementasikannya, namun jika berbeda dengan pandangan pembuat kebijakan, proses implementasinya menimbulkan banyak masalah.

d. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi, ketepatan organisasi yang melaksanakan implementasi kebijakan. Karena struktur organisasi yang melaksanakan implementasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi yang dijalankan. Salah satu aspek yang harus ada dalam organisasi adalah adanya proses operasional yang jelas dan sesuai dengan standar sehingga dapat menjadi pedoman. SOP merupakan pedoman bagi semua pelaksana yang sedang berjalan. Struktur organisasi yang lebih tua cenderung melemahkan pengawasan dan menciptakan birokrasi, prosedur birokrasi yang kompleks yang membuat organisasi menjadi kurang fleksibel.

KESIMPULAN

Implementasi adalah sebuah bagian paling penting dalam suatu kebijakan yang telah dirumuskan, termasuk dalam bidang kebijakan pendidikan. Implementasi kebijakan bertujuan untuk menentukan posisi agar kebijakan pendidikan dapat diaktualisasikan. Pada penerapan kebijakan pendidikan ada sistem yang harus ditempuh dengan memperhatikan prinsip yang telah

ditetapkan, strategi dan langkah yang harus di perhatikan dalam mengimplementasikan kebijakan, melihat kecukupan dan kelengkapan dalam mengimplemetasikan kebijakan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dalam implementasi kebijakan

DAFTAR PUSTAKA

- Alfirzan, A., Nasri, Y., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan Pendidikan serta Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(1), 1521–1529.
- Amal, B. K. (2018). Faktor-Faktor yang Memepengaruhi Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Prosiding Seminar Nasional*, 2, 516–518. <http://semnasfis.unimed.ac>
- Darsyah, S., & Chanifudin, C. (2020). Kebijakan Dalam Pendidikan. ... -*Thullab: Journal of Islamic Studies*, 3715. <https://ejournal.stai-nh.ac.id/index.php/atthullab/article/download/6/7>
- Dr.farida Nugrahani, M. H. (2014). Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa. *I*(1), 305.
- Hastuti, T. P., & Soehartono, S. (2018). Kebijakan Pendidikan Di Tinjau Dari Segi Hukum Kebijakan Publik. *Jurnal Jurisprudence*, 8(1), 34–41. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v8i1.6293>
- Keban T, Y. (2004). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, Isu* (Edisi 2). Gava Media.
- Luis, F., & Moncayo, G. (n.d.). *ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN*.
- Presiden Republik Indonesia. (2019). Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No 63/KEP/M.PAN/7/2003. *Ombudsman*, 1.
- Rasyidin. (2018). *Implementasi Kebijakan Peningkatan Kompetensi Guru di Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan*. 20–67.
- Rusdiana. (2015). *Kebijakan Pendidikan.pdf* (pp. 1–263).
- Sa'ud Udin Syaefudin, A. S. M. (2009). *Perencanaan pendidikan : Suatu pendekatan komprehensif* (Cet.4). Remaja Rosdakarya.
- Wahab, S. A. (2005). *Analisis kebijaksanaan : Dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara* (cetakan 5). Bumi Aksara.
- Winarno, B. (2007). *Kebijakan publik : Teori dan proses*. media pressindo.
- Yuliah, E. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal At-Tadbir*, 30, 25.